

**PENGARUH KOLONISASI TERHADAP TERBENTUKNYA KELOMPOK
KRIMINALITAS DI LAMPUNG**
THE EFFECT OF COLONIZATION ON CRIME FORMATION GROUP IN LAMPUNG

SELF MAHAT PUTRI

Program Studi Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Telepon: 0741-5917398, Faksimile. 0741-583111

Abstrak

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui, bagaimana aksi-aksi kekerasan saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja yang biasanya selalu identik dengan tindakan kriminalnya, tetapi sudah merambat ke kota-kota kecil di daerah bahkan desa yang selalu dianggap kuat kearifan lokalnya. Salah satu tindakan kekerasan yang membuat kita tersadarkan lagi yaitu meletusnya konflik Mesuji-Lampung pada 10 November 2011 yang terkait masalah tanah antara warga dan perusahaan perkebunan. Konflik ini telah banyak memakan korban.

Melihat sejarah masyarakat Lampung dan perkembangannya sekarang untuk mengetahui bagaimana mulai munculnya kriminalitas di Lampung. Sebab, Lampung selalu dicap daerah pemasok banyak penjahat yang tak hanya beraksi di Lampung tetapi juga di Luar Lampung yang terkenal berasal dari Jabung, Lampung Timur. Jabung telah dicap sebagai daerah "hitam" yang menghasilkan pelaku kriminalitas.

Kata Kunci: kolonisasi, kriminalitas, Lampung

Abstract

This study was conducted to determine how the violence is now not only in big cities are usually always synonymous with criminal action, but has spread to small towns in the area even village has always been considered a strong local wisdom. One act of violence that makes us awaken again that Mesuji-Lampung conflict erupted on November 10, 2011, which related to the problem of land between residents and plantation companies. This conflict has been a lot of casualties.

Lampung look at the history and development community now to find out how to start the rise of criminality in Lampung. Because, Lampung always stamped region supplying many of the criminals who not only act in Lampung, Lampung, but also in the famous Outer derived from Jabung, East Lampung. Jabung has been labeled as an area of "black" which resulted in the crimes committed

Keywords: Colonization, Crime, Lampung

PENDAHULUAN

Hampir setiap hari kita selalu disuguhi dengan berita kekerasan, kasus pembunuhan, penculikan, perampokan dan kerusuhan. Aksi-aksi kekerasan ini

tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja yang biasanya selalu identik dengan tindakan kriminalnya, tetapi sudah merambat ke kota-kota kecil di

daerah bahkan desa yang selalu dianggap kuat kearifan lokalnya.

Krisis politik yang mengakhiri rezim Suharto yang sebelumnya nampak seolah-olah tak tergoyahkan. Upaya-upaya untuk membangun sebuah sistem baru yang demokratis diiringi dengan kekerasan yang meningkat tajam. Di berbagai mass media luar negeri, Indonesia lalu disamakan dengan bermacam bentuk kekerasan, seperti pengejaran keturunan Tionghoa, asap api tebal yang menggelantung di atas kota Jakarta, upaya pembunuhan secara sembunyi-sembunyi di Jawa Timur, kekerasan “etnik” di Kalimantan Barat, konflik “agama” di Maluku, milisia yang menghancurkan Timtim, aksi-aksi militer yang ganas di Aceh, serta gang penjahat lokal yang mengendalikan Lombok.¹

Salah satu tindakan kekerasan yang masih hangat hingga saat ini yaitu meletusnya konflik Mesuji-Lampung pada 10 November 2011 yang terkait masalah tanah antara warga dan perusahaan perkebunan. Hebohnya pemberitaan di mass media yang menyorot mengenai kasus ini, sehingga banyak pihak ikut terlibat untuk melakukan penyelidikan. Konflik yang pertama antara warga adat dan PT SI di tanah register 45 di kawasan Way Buaya. Di sana warga tergusur dari tempat

¹HenkSchulteNordholt, *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas Dalam Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 1.

yang mereka tinggali dan masih bertahan di tenda-tenda dan terus menuntut. Konflik kedua terjadi antara warga Desa Sri Tanjung, Nipah Kuning, dan Keagungan Dalam versus PT BSMI. Warga tiga desa itu masih bergesekan dengan perusahaan meski BSMI sudah tak beroperasi.²

Peristiwa ini, seakan mengingatkan kembali Peristiwa Lampung 1989 yang juga mendapat perhatian besar. Peristiwa yang dikenal dengan banyak sebutan ini yaitu: (1) Peristiwa Talangsari, (2) Peristiwa Way Jepara, (3) Peristiwa Lampung, (4) Komando Mujahidin Fisabillah dan (5) GPK Warsidi. Warsidi, pimpinan utama kelompok pengajian di Cihideung dituduh melakukan kegiatan subversif untuk mendirikan negara Islam. Permintaan dan tuduhan ini ditolak sehingga terjadi bentrokan fisik. Peristiwa Lampung ini merupakan salah satu konflik vertikal antara negara dan masyarakat.³

Peristiwa Lampung 1989 dan Mesuji meninggalkan luka yang mendalam bagi para keluarga korban dan memperkuat “citra” bagi

²“Mesuji-Sumsel Tenang, Lampung Masih Panas”, www.riaupos.co.id, diakses pada 3 Januari 2013, jam 19.00 Wib.

³Abdul Syukur, *Gerakan Usroh di Indonesia: Peristiwa Lampung 1989* (Yogyakarta: Ombak, 2003), hlm. 1-3. Lihat juga Abdul Syukur “Jaringan Lokal Abdullah Sungkar dalam Peristiwa Lampung 1989, dalam Henkdkk, *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm.217-244.

Lampung sebagai daerah pemasok banyak penjahat yang tak hanya beraksi di Lampung tetapi juga di Luar Lampung yang terkenal berasal dari Jabung, Lampung Timur. Jabung telah dicap sebagai daerah "hitam" yang menghasilkan pelaku kriminalitas. Penelitian ini mencoba melihat ke belakang bagaimana mulai munculnya kriminalitas di Lampung.

Ada dua tujuan penting dalam penelitian ini. Pertama, menjelaskan pengaruh kolonisasi terhadap terbentuknya kelompok kriminalitas di Lampung. Kedua, untuk mendokumentasikan potongan-potongan kisah kriminal dan konflik yang terjadi pada masyarakat Lampung agar bisa diselesaikan secara budaya.

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: pertama, dapat menambah khasanah historiografi lokal, khususnya yang berkaitan dengan penulisan sejarah kriminal dan konflik. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi kajian selanjutnya mengenai sisi sejarah kriminal dan konflik yang terjadi di Lampung supaya bisa dicarikan solusi yang tepat.

TEORI DAN METODE

Tulisan-tulisan tentang kriminalitas hampir setiap hari muncul dalam berbagai media massa. Tulisan HenkSchulteNordholtdalam buku "Kriminalitas, Modernitas dan Identitas Dalam Sejarah Indonesia" ini diperlihatkan

adanya semacam kontinuitas kekerasan dalam perspektif sejarah: masa kerajaan, kolonial, post-kolonial. Ia merunut dan menempatkan kekerasan dalam konteks yang lebih luas, khususnya dalam rangka pembentukan negara. Dijelaskan tentang genealogi kekerasan yang memperlihatkan intensitas tinggi khususnya pada masa peralihan kekuasaan dan pada masa negara sedang berusaha memperkuat kekuasaannya, juga masa ekonomi yang suram.

Selain itu, kajian Abdul Syukur tentang Gerakan Usroh di Indonesia: Peristiwa Lampung 1989. Pada tahun 1986 beberapa mantan aktifis gerakan usroh Abdullah Sungkar dan kota Solo, Jawa Tengah, melarikan diri ke Lampung untuk menghindari operasi penangkapan oleh Pangdam Diponegoro Mayjen HarsudionoHartas. Mereka bergabung dengan kelompok pengajian Warsidi yang berada di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 1987 kelompok pengajian Warsidi pindah ke Umbul Cihideung, Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, setelah memperoleh tanah seluas 1 ½ hektar dari Jayus, seorang penduduk Umbul Cihideung. Warsidi mempunyai cita-cita mendirikan pondok pesantren. Ia meminta bantuan mantan aktifis gerakan usroh Abdullah Sungkar untuk mencari murid dan sekaligus menyediakan tenaga pengajar dengan

memanfaatkan jaringan gerakan usroh Abdullah Sungkar di Solo dan Jakarta. Tetapi penelitian lanjutan mulai tingginya tingkat kriminalitas di Lampung belum banyak dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang di dapat dari sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber visual. Sumber tertulis (literacy) didapatkan dari catatan arsip, majalah, surat kabar, buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal ilmiah. Setelah melakukan pengumpulan sumber, lalu data-data yang di dapat diverifikasi untuk mengetahui kevalidan dan kebenaran data, lalu dilakukan interpretasi (analisis) data hingga selanjutnya bisa dilakukan penulisan sejarah (historiografi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal usul bangsa Lampung adalah dari Sekala Brak yaitu sebuah Kerajaan yang letaknya di dataran Belalau, sebelah selatan Danau Ranau yang secara administratif kini berada di Kabupaten Lampung Barat. Dari dataran Sekala Brak inilah bangsa Lampung menyebar ke setiap penjuru dengan mengikuti aliran Way atau sungai-sungai yaitu Way Komring, Way Kanan, Way Semangka, Way Seputih, Way Sekampung dan Way Tulang Bawang beserta anak sungainya, sehingga meliputi dataran Lampung dan Palembang serta Pantai Banten. Sekala Brak memiliki makna yang dalam dan sangat penting bagi bangsa Lampung. Ia melambangkan

peradaban, kebudayaan dan eksistensi Lampung itu sendiri. Bukti tentang kemasyuran kerajaan Sekala Brak didapat dari cerita turun temurun yang disebut warahan, warisan kebudayaan, adat istiadat, keahlian serta benda dan situs seperti tambo dan dalung seperti yang terdapat di Kenali, Batu Brak dan Sukau. Kata Lampung sendiri berawal dari kata Anjak Lambung yang berarti berasal dari ketinggian ini karena para puyang Bangsa Lampung pertama kali bermukim menempati dataran tinggi Sekala Brak di lereng Gunung Pesagi.

Dari segi administratif, Lampung merupakan karesidenan paling selatan di Sumatra dengan luas 29.365 km². Di utara wilayah ini dibatasi oleh karesidenan Palembang dengan sungai Mesuji untuk sebagian besar sebagai garis batasnya. Sementara sebagian kecil batas utara yakni disebelah Baratnya dibentuk oleh MataWolu dan Way Pisang. Di barat dibatasi oleh Karesidenan Bengkulu dan Palembang. Lampung merupakan wilayah yang penuh dengan perbukitan, diliputi dengan hutan yang sangat langka, diselingi dengan alang-alang besar. Semakin menyisir wilayah utara hutan ini semakin lebat. Di bagian timur wilayah ini terdiri atas dataran rendah, sementara daerah pantai diliputi rawa. Sebagian besar wilayahnya terdiri atas tanah yang merah dan keras, mengandung biji besi.⁴

⁴Effendi, "Pialang Adat di Bumi Ruwa Jurai Penyimbang di Karesidenan Lampung 1928-

Kondisi geografis yang digambarkan di atas mempengaruhi mata pencaharian masyarakat setempat. Kondisi perbukitan yang mengitari wilayah Lampung menunjukkan bahwa Lampung sebagian besar terdiri atas dataran tinggi, sehingga tanaman utama yang potensial untuk dikembangkan di wilayah ini adalah jenis tanaman dataran tinggi, seperti lada, kopi, dan kayu sebagai hasil hutan. Untuk wilayah dataran rendah, padi, ketela, ubi, jagung dan kacang-kacangan sebagai tanaman andalan. Penduduk asli Lampung adalah petani produk tanaman keras seperti kopi, lada, damar, rotan dan karet. Produk terbesar yang menjadi andalan masyarakat Lampung adalah lada.

Pemukiman orang-orang Lampung yaitu kampung-kampung yang terletak di tepi sungai atau dekat sungai. Setelah alat pengangkutan darat berkembang, kampung-kampung juga terletak di sekitar atau di tepi jalan raya atau jalan kereta api. Biasanya dibelakang perkampungan tersebut terletak tanah pertanian atau perkebunan. Letak rumah-rumah orang Lampung berdekatan satu sama lain dan hampir-hampir tidak mempunyai halaman.

Masyarakat Lampung adalah masyarakat Adat, Lampung dikenal dengan propinsi Sang Bumi Ruwa Jurai artinya bumi yang serba dua dalam kesatuan, atau bumi kediaman mulia dari dua golongan

1942", *Thesis*(Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM, 2007), hlm. 24-27.

masyarakat yang berbeda asal-asulnya. Keadaan yang serba dua itu dapat dilihat dari beberapa hal :pertama, masalah penduduk di Lampung terdapat dua kelompok besar, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang (Jawa, Sunda, Minang, Sumatera Selatan, Bugis, Cina, Arab dan lainnya). Kedua, adat istiadatnya, masyarakat Lampung asli ada yang beradat Pepadun (Masyarakat Lampung yang berdiam di sepanjang aliran sungai yang besar bermuara ke Laut Jawa / suku Lampung Darat / LampungUnggak) dan ada pula yang beradat Saibatin (Lampung Pesisir/ masyarakat pesisir). Ketiga, bahasanya, yaitu suku Lampung asli punya dua logat bahasa, yaitu logat "o" (Lampung beradat Pepadun) dan logat "a" (Lampung beradat Saibatin).⁵

Sistem kebuwaian atau marga merupakan sistem pemerintahan asli di daerah Lampung yang sudah berkembang sejak lama, terutama di Lampung Utara. Sistem ini menitikberatkan pada musyawarah dan mufakat antar punyimbang adat yang dikaitkan juga dengan genealogis yang memiliki hak otonom. Di daerah Lampung belum pernah ada suatu pemerintahan pusat dari orang-orang Lampung sendiri dan berkuasa atas suku-suku penduduk asli Lampung. Pemerintahan penduduk asli sejak dahulu adalah pemerintahan yang dipegang oleh kepala suku-kepala suku yang bersangkutan (yang kemudian dikenal dengan

⁵*Ibid.*, hlm. 33-34.

sebutan punyimbang). Mereka satu sama lain bersaing sehingga di antara mereka tidak pernah ada kata sepakat untuk mengangkat salah seorang menjadi pembesar distrik ataupun pembesar di atas kepala marga/suku/buai. Keadaan ini memberi kesempatan kepada petualang-petualang dari luar untuk memperoleh pengaruh dan kekuasaan dengan mudah di Lampung.⁶

PERSENTUHAN DENGAN KOLONIAL

Hubungan orang-orang Belanda dengan Lampung dimulai dari zaman VOC. Hubungan pertama dengan Banten, segera diikuti dengan peperangan dan pembuatan kontrak dagang dimana penyeteroran lada termasuk ditawarkan, seperti yang sebagian besar diterima oleh Banten dari Lampung. Menunjukkan bahwa pada tahun 1668 benteng Petrus Albertus di Menggala (Sekarang ibukota Onderafdeeling Tulangbawang) didirikan demi kepentingan perdagangan lada, yang hanya bertahan dalam waktu singkat. Pada tahun 1684 VOC menerima hak monopoli perdagangan lada di Banten dan Lampung bagi biaya perang yang telah dikeluarkan demi kepentingan Sultan Haji dari Banten. Setelah kejatuhan kerajaan Banten pada tahun 1808, Lampung segera ditempatkan dibawah kekuasaan pemerintahan Daendels.⁷

⁶*Ibid.*, hlm. 116.

⁷*Ibid.*, hlm. 101-103.

Pada tahun 1899, C.TH vanDevender, seorang anggota RaadvanIndie dalam tulisannya yang berjudul *Een EereSchuld* dalam majalah *DeGids*, Amsterdam menguraikan tentang kemelaratan penduduk di Jawa sebagai akibat dari kerja paksa dan *cultuurstelsel*. Ia menghimbau Pemerintah Belanda untuk melakukan tindakan-tindakan guna memperbaiki nasib rakyat. Karena di ilhami oleh tulisan Van Deventer itu Raja Belanda memberi pengarahan untuk memperbaiki kemakmuran rakyat di Jawa. Van Daventer membuat suatu perumusan yang pokoknya adalah *educatie*, *irrigatie* dan *emigrasi*.

PemerintahKolonialBelandapadatahun 1905, telahmemindahkan 155 keluar dari Karesidenan Kedua Jawa Tengah menuju daerah Gedongtataan di Lampung. Lembaga yang mengurus Transmigrasi adalah lembaga interdepartemen yaitu *Centraal Commissie oor Emmigratieen Kolonisatie van Inheemsen*. Agar penduduk yang dipindahkan betah untuk tinggal di tempat baru, diupayakan mengondisikan daerah tujuan seperti Pulau Jawa. Pada tahap awal, setiap kepala keluarga memperoleh 20 Gulden, dibebaskan dari biaya transportasi serta mendapatkan sumbangan biaya hidup sekitar 0.4 Gulden tiap harinya selama penyiapan tanah. Selain itu juga mendapatkan biaya bangunan rumah 65 Gulden, pembelian alat-alat 13.5 Gulden, ditambah 0.7 hektar sawah dan 0.3 hektar tegalan serta pekarangan.

Penduduk yang berhasil dipindahkan pada masa ini yang berkisar antara tahun 1905-1911 adalah sekitar 4800 orang.

Desa inti pertama yang dibangun pada tahun 1905 di Gedong Tataan, kira-kira 25 km di sebelah baratnya Tanjungkarang di pinggir jalan ke Kota Agung. Pembangunan desa ini dilakukan menurut pola dari Jawa. Sampai pada tahun 1911 dibangun 5 desa inti. Segala sesuatunya disini di atur seperti di Jawa, termasuk struktur pemerintahannya, dengan kamituo, lurah dan asisten wedana yang berlainan dengan struktur pemerintahan masyarakat sekitarnya yang merupakan masyarakat adat. Sistem pertaniannya pun berbeda. Jadi daerah kolonisasi itu merupakan enclave sosial dan politik.



Kedatangan kolonis di Lampung



Rumah yang ditempati transmigran asal Jawa di Lampung pada 1940-an (Dok: KITLV)

Dalam periode ini para kolonis dibantu secukupnya. Sebagai perangsang setiap KK diberi premi 20,00 gulden, dilengkapi dengan alat-alat masak dan alat-alat pertanian. Dalam tahun 1921 dibuka satu proyek lagi di Way Semangka (Kota Agung) untuk orang-orang asal Wonosobo, oleh karena itu desa intinya pun diberi nama Wonosobo.

Padaperiode ini mengalami perbuahan dari periode yang sebelumnya. Biaya-biaya lain tidak diberikan lagi, namun diberikan fasilitas untuk memperoleh pinjaman uang sebesar 200 Gulden dengan bunga 9 persen per tahunnya. Guna mendukung hal tersebut, Pemerintah

kolonial mendirikan *Lampongsche Voklsbank* pada bulan maret 1911. Pinjaman yang diberikan hanya boleh untuk dibelikan ternak, alat-alat pertanian, serta bahan-bahan untuk membuat rumah. Namun, kekuatan lembaga keuangan tersebut tidak dapat berjalan lama sehingga pada tahun 1928 mengalami kebangkrutan.⁸

Pada periode *Lampongsche Volksbank* pelaksanaannya belum dapat dikatakan berhasil. Penyebabnya adalah perencanaan yang kurang matang dan implementasi yang banyak menyimpang. Masalah tempat pemukiman, irigasi dan lainnya tidak direncanakan secara matang sehingga menyebabkan kerugian secara financial. Walaupun pemerintah Belanda telah mengonsepsi suasana sosial budaya dan sistem pertanian yang hampir sama dengan daerah asal, namun daerah yang telah dipersiapkan tersebut tidak memenuhi kriteria. Sistem irigasi dan transportasi tidak memadai sehingga banyak yang tidak betah dan kembali ke Pulau Jawa. Dalam perekrutan, Pemerintah Belanda memberi instruksi lura-lurah untuk mengirim sejumlah orang. Cara perekrutan demikian menyebabkan orang tidak siap untuk memulai kehidupan di daerah tujuan.

Pada tahun 1928 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan suatu peraturan untuk mengatur kedudukan Marga dalam daerah Lampung. Marga adalah lembaga adat untuk

⁸Slamet Purboadiwidjojo, "Mencari Suatu Sistem untuk Melaksanakan Pemindahan Penduduk Secara Besar-besaran" dalam *Sepuluh Windu: Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 9-15.

membina kesatuan dan persatuan masyarakat berdasarkan keturunan (genealogis). Menurut aslinya, hak milik tanah dalam daerah Lampung adalah milik keluarga (marga) yang warganya mempunyai hak usaha pakai. Akan tetapi sistem pemerintahan kebuaian/suku/marga inilah nantinya yang akan menjadi sistem pemerintahan marga (Marga Stelsel) di Lampung yang ditetapkan melalui

Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewest en (IGOB) pada tahun 1928. Pada tahun itu para punyimbangbuia/marga di Lampung menuntut ulayatnya. Walau berhasil diakui, tetapi dalam pelaksanaannya sangat dibatasi, dimana hak ulayatnya hanya tinggal berupa wewenang mengurus tanah marga atas nama Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pemerintahan marga dijadikan sebagai pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda di Lampung, sebagaimana telah dilaksanakan sebelumnya di daerah Palembang, Sumatera Selatan.⁹

Bagi daerah kolonisasi yang penduduknya bukan "asli" Lampung (transmigran dari Jawa dan lainnya), onder-district dibagi lagi dalam onder-district yang dikepalai oleh asisten wedana. Jabatan demang, asisten demang, ataupun asisten wedana dipegang oleh seorang pribumi

⁹Effendi, "Pialang Adat di Bumi Ruwa Jurai Penyimbang di Karesidenan Lampung 1928-1942", *Thesis*(Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM, 2007), hlm. 116-117.

Indonesia, baik dari etnis Lampung maupun non-Lampung.

Kemudian pada tingkat yang paling bawah oleh pemerintah Hindia Belanda diakui eksistensi sistem pemerintahan marga yang dikepalai oleh seorang punyimbang marga yang bergelar pasirah. Pasirah-pasirah ini mengepalai kepala kampung-kepala kampung dan kepala suku. Dengan mengakui eksistensi pemerintahan marga/kebuaiian di Lampung, Pemerintah Hindia Belanda tampaknya bermaksud ingin mempertahankan dan tetap memfungsikan tokoh utama yang memadukan antara sistem berdasar genealogis dan demokratis (melalui pemilihan) diantara para penyimbang yang bersifat genealogis.

Terlihat bahwa Pemerintah Kolonial telah melakukan intervensi dalam sistem politik, sosial, ekonomi bahkan budaya para penguasa lokal di Lampung. Kesemuanya itu sekaligus membawa dampak dalam segala lini kehidupan masyarakat, baik politik, sosial, ekonomi dan budaya yang berkaitan dengan kehidupan para penguasa lokal yang terkenal dengan sebutan penyimbang. Pada masa ini adanya transmigrasi yang dilakukan Pemerintah Belanda sebenarnya mempunyai tujuan terselubung yaitu untuk mendukung adanya tenaga kerja murah bagi perkebunan tanaman-tanaman ekspor yang menguntungkan bagi perekonomian.

KOLONISASI (TRANSMIGRASI) SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, segala sesuatu yang berbau kolonial, adat dan feodal segera disingkirkan. Sementara itu di Lampung terjadi suatu ketegangan. Dewan Pemerintah Daerah memutuskan untuk menghapus marga sebagai lembaga pemerintahan. Marga sebagai lembaga adat boleh hidup terus, tetapi generasi muda tidak lagi memegang teguh. Pemerintah Marga dialihkan kepada aparat pemerintahan bentukan baru dengan mengambil pola dari Jawa, yaitu Bupati, Wedan dan Asisten Wedana. Ketentuan Belanda di luar Jawa tentang adat *gemeenschappen* dihapus.

Oleh karena itu tidak ada lagi rintangan bagi mereka yang bukan untuk mendapatkan hak pakai tanah dalam wilayah bekas marga. Maka segera setelah ada keputusan anak-anak transmigran lama di Gedong Tataan, yang relatif sudah mulai berlebihan penduduknya, mereka keluar dari lokasi semula dan mengalir ke daerah sekitarnya untuk membuka pemukiman baru. Arus ini makin lama makin besar, transmigran spontan ini jauh lebih besar daripada arus transmigran yang disalurkan oleh pemerintah.

Selain itu munculnya para pejuang-pejuang atau laskar-laskar bersenjata yang sudah tak dipakai lagi setelah kemerdekaan. Diberbagai tempat timbul gerombolan-gerombolan bersenjata yang dipengaruhi oleh golongan ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Di Jawa Barat muncul DI, di Cirebon Barisan

Sakit Hati, di Purwakarta dan Kerawang tidak jelas identitasnya, di berbagai tempat lain timbul gerombolan-gerombolan kecil yang bersifat kriminal. Keadaan itulah yang mendorong Pemerintah RI untuk membuat transmigrasi bekas anggota badan-badan perjuangan bersenjata. Lampung dipilih karena daerah ini telah terbentuk daerah-daerah transmigrasi yang menjadi sentra produksi padi, sehingga penyediaan bahan makanan akan mudah serta dapat berfungsi sebagai basis operasi ataupun terugval basis bila gagal.¹⁰

Beberapa kasus juga terjadi setelah beberapa tahun belakangan ini, mulai dari Bentrokan berdarah antarkampung di Lampung Selatan. Tanda-tanda konflik sudah terlihat sebelum meledak, namun pemerintah daerah dan polisi lamban bergerak. Lambatnya antisipasi ini makin mengherankan karena konflik serupa bukanlah yang pertama kali terjadi di Lampung Selatan. Dalam setahun saja sudah empat kali terjadi bentrokan yang berakibat hilangnya nyawa dan rusaknya puluhan rumah. Berulangnya konflik dalam waktu singkat menunjukkan bahwa akar persoalan belum diatasi hingga tuntas. Ketika bentrokan terjadi, penyelesaian yang dilakukan hanya

menyentuh permukaan, bukan akar masalahnya. Upaya dialog di antara pihak yang bertikai melalui mediasi pihak musyawarah pimpinan daerah akhirnya hanya bersifat formalitas. Solusi yang diajukan pun tak ditindaklanjuti. Wajar saja jika konflik pun kembali terjadi. Siklus itulah yang terjadi dalam bentrokan terakhir di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan.

Konflik Lampung ini berakar dari kurang harmonisnya hubungan antara warga pendatang, yaitu kelompok etnis Bali, dan penduduk asli. Warga Bali datang ke Lampung sejak zaman Belanda sebagai transmigran. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, rombongan yang berdatangan makin banyak. Sebagian dari mereka adalah korban letusan Gunung Agung, Bali, pada 1963. Sebagian lain yang menyusul kemudian adalah rombongan proyek transmigrasi yang dilakukan pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru.

Ketika rombongan warga Bali ini mulai bermukim, benih-benih gesekan bermunculan. Gesekan itu didorong oleh kesenjangan ekonomi antara kelompok pendatang dan penduduk asli. Pendatang umumnya sukses sebagai pengusaha dan petani kebun kelapa sawit, sedangkan warga lokal banyak yang menjadi petani penggarap. Penduduk lokal juga menuding para pendatang dari Bali ini enggan membaur. Kebiasaan warga Bali membangun kampung menyerupai desa asalnya di Bali, lengkap

10 Slamet Purboadiwidjojo, "Mencari Suatu Sistem untuk Melaksanakan Pemindehan Penduduk Secara Besar-besaran" dalam *Sepuluh Windu: Transmigrasi di Indonesia 1905-1985*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm.19-22.

dengan pusat ibadah dan kebudayaannya, dianggap sebagai simbol keengganannya membaaur.

KESIMPULAN

Daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan jumlah penduduk yang sedikit. Akhirnya harus takluk dengan sistem politik etis yang dijalankan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pengiriman penduduk Jawa ke Lampung pada tahun 1905 dan akhirnya penduduk Bali dan daerah lainnya telah merubah sistem pemerintahan adat yang ada. Wilayah-wilayah Lampung akhirnya berubah menjadi kampung-kampung Jawa (umumnya) dan kampung-kampung Bali dan lainnya. Kampung-kampung ini pun mengadopsi nama-nama daerah mereka berasal seperti, Wonosobo, Wonosari, Wates, Bagelen dll. Penduduk Jawa ini tetap mempertahankan budaya dan tradisi adat Jawa baik itu kesenian maupun bahasa. Sehingga banyak sekali masyarakat Jawa di Lampung tidak bisa berbahasa Lampung.

Semakin banyaknya penduduk Jawa di Lampung, jumlahnya seakan melebihi penduduk asli Lampung. Mereka hidup dengan budaya dan pola yang ada di Jawa. Sehingga masyarakat pribumi Lampung seakan terpinggirkan, tidak hanya dalam hal budaya tetapi juga dalam masalah mata pencaharian karena tanah-tanah marga mereka telah habis dijadikan sebagai kampung-kampung transmigran. Sehingga orang-orang Lampung ini masih menganggap penduduk

asal Jawa sebagai orang-orang asing yang kehadirannya tak disukai dan adat istiadatnya tak dipahami.

Selain itu, masuknya para transmigran yang berasal dari pejuang-pejuang atau laskar-laskar bersenjata yang sudah tak bekerja lagi setelah kemerdekaan. Mereka menjadi gerombolan-gerombolan pembuat kerusuhan ketika di Jawa, dan mereka dikirim pemerintah untuk melakukan transmigrasi ke Lampung supaya mempunyai kesibukan dan pekerjaan lain. Tetapi permasalahannya, mereka tidak memiliki keahlian dalam bidang bertani. Sehingga kelompok-kelompok ini hanya menjadi pengganggu dan perusuh. Jiwa pejuang atau militer yang mereka miliki dipergunakan untuk menakut-nakuti warga.

Sehingga dapat kita lihat bahwa kriminalitas di Lampung tidak seutuhnya dilakukan oleh masyarakat asli Lampung, yang selama ini mereka selalu mendapat “imej” jelek dari para pendatang di Lampung. Padahal para transmigranlah yang memulai kelompok-kelompok kriminalitas ini. Walaupun pada tahap selanjutnya, kriminalitas juga dilakukan oleh masyarakat Lampung sendiri. Hal ini karena desakan faktor ekonomi, yaitu tanah tempat mereka mencari nafkah telah menjadi milik orang lain (pendatang). Dan mereka hidup dengan kemiskinan di kampung mereka sendiri. Sehingga mereka merasa wajar ketika melakukan penjarahan dan perampokan pada masyarakat-masyarakat pendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syukur. Gerakan Usroh di Indonesia: Peristiwa Lampung 1989. Yogyakarta: Ombak, 2003.
- _____, "Jaringan Lokal Abdullah Sungkar dalam Peristiwa Lampung 1989" dalam HenkSchulteNordholt, dkk. ed. Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KILTV, 2008.
- Amurwani Dwi. "Lue Jual Gula Beli: Jago dan Jagoan Kriminalitas di Jakarta 1930-1960" dalam Taufik Abdullah dan Sukri Abdurrahman ed. Indonesia AcrossOrders: Arus Bawah Sejarah Bangsa (1930-1960). Jakarta: LIPI Press, 2011.
- Anhar Gonggong, dkk (ed). Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Lampung. Jakarta: DepdikbudDirektoral Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993.
- Bambang Purwanto. "Kekerasan dan Kriminalitas di Kota pada Saat Transisi : Kotagede, Yogyakarta pada Akhir Masa Kolonial dan Awal Kemerdekaan" dalam FreekColombijndkk, ed. Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia. Yogyakarta: Ombak, 2005.
- Effendi, "Pialang Adat di Bumi Ruwa Jurai Penyimbang di Karesidenan Lampung 1928-1942", Thesis. Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM, 2007.
- Frederick, William, "Shadowofan Unseen Hand. Some Patternsof Violence in the Indonesian Revolution, 1945-1949", dalam FreekColombijn& J. Thomas Lindblad ed., RootofViolence in Indonesia. ContemporaryViolence in HistoricalPerspective, Leiden: KITLV, 2002
- Marsden, William. Sejarah Sumatra. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- "Mesuji-Sumsel Tenang, Lampung Masih Panas", www.riaupos.co.id, diakses pada 3 Januari 2013, jam 19.00 Wib.
- Nordholt Henk Schulte. Kriminalitas, Modernitas dan Identitas Dalam Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Slamet Purboadiwidjojo," Mencari Suatu Sistem untuk Melaksanakan Pemandangan Penduduk Secara Besar-besaran" dalam Sri-Edi Swasono dan Masri Singarimbun. Sepuluh Windu: Transmigrasi di Indonesia 1905-1985. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.